

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Dari berbagai hasil temuan terkait tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tirta Mandiri maka dapat diambil kesimpulan untuk menjelaskan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa ) Dalam Prespektif *Reinventing Government* dan analisis faktor pendorong atau penghambat di BUM Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah:

##### 1. BUM Desa yang Katalis

Melalui identifikasi terkait pemerintahan yang katalis baik dari pemerintah Desa Ponggok maupun dari BUM Desa Tirta Mandiri memberikan gambaran bahwa adanya upaya untuk mengarahkan dibandingkan melayani. Pemerintah Desa mengarahkan BUM Desa Tirta Mandiri dengan susunan strategis struktur organisasi pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri. Sedangkan BUM Desa Tirta Mandiri mengarahkan dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri.

##### 2. BUM Desa Milik Masyarakat

BUM Desa Tirta Mandiri merupakan BUM Desa yang berorientasi bahwa apapun yang di lakukan oleh BUM Desa adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat Desa Ponggok dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri. Keterlibatan masyarakat Desa Ponggok adalah dari Sumber Daya Manusia (SDM) hingga keterlibatan dalam investasi di BUM Desa Tirta Mandiri.

### 3. BUM Desa Bersifat Kompetitif

Pemasukan terbesar BUM Desa Tirta Mandiri adalah dari sektor pariwisata yaitu Umbul Ponggok. Walaupun BUM Desa Tirta Mandiri awalnya bergerak berdasarkan inisiasi hanya untuk mengembangkan potensi alam yang di miliki Desa Ponggok, namun Desa Ponggok secara tidak langsung menjadikan BUM Desa Tirta Mandiri yang bersifat kompetitif. Salah satu faktor pendorong adalah bahwa pemerintah desa mengembangkan unit usaha selain BUM Desa Tirta Mandiri dalam menambah APB Desa. Hal tersebut yang menjadikan BUM Desa Tirta Mandiri, selain berupaya mempertahankan pendapatan, juga secara tidak langsung menjadi Badan Usaha yang harus bersaing pada bidangnya, seperti di sektor pariwisata.

### 4. BUM Desa Berorientasi Misi

Osborne dan Gaebler menjadikan sistem *Expenditure Control Budget* (Anggaran Pengendalian Belanja) sebagai sistem anggaran yang tepat dalam pencapaian misi suatu organisasi, yaitu sistem perencanaan anggaran di awal kemudian akan di anggarka sesuai keperluan guna mencapai misi organisasi. Sistem anggaran ini juga di terapkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri, walau tidak ada penamaan khusus untuk sistem anggaran di BUM Desa Tirta Mandiri.

### 5. BUM Desa Berorientasi Hasil

Bila di selaraskan dengan konsep berorientasi hasil yang di gagas oleh Osborne dan Gaebler, bahwa pemerintah yang berorientasi hasil adalah pemerintah yang memberikan apresiasi kepada karyawan berdasarkan pencapaian yang telah dicapai, maka BUM Desa Tirta Mandiri menganut hal tersebut. Evaluasi dan apresiasi di lakukan oleh BUM Desa Tirta Mandiri guna mengetahui kinerja karyawan dan memberikan apresiasi untuk setiap kinerja.

#### 6. BUM Desa Berorientasi Pelanggan

BUM Desa Tirta Mandiri perlahan-lahan dalam pengembangannya mulai melirik kemauan pelanggan atau mulai responsif terhadap kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Fasilitas yang memadai mulai di optimalkan sejalan dengan perkembangan masing-masing unit usaha di BUM Desa Tirta Mandiri. Walaupun secara kinerja, unit usaha Umbul Pongkok lebih masif dalam memenuhi kebutuhan pengunjung.

#### 7. BUM Desa Bersifat Wirausahawan

“Membelanjakan untuk menabung atau investasi untuk mendapatkan hasil”, begitulah karakteristik yang dilihat pada pemerintah wirausaha. BUM Desa Tirta Mandiri menjadikan bisnis sebagai operasional utama, dengan melakukan investasi untuk mendapatkan hasil.

#### 8. BUM Desa yang Antisipatif

Dalam Pemerintahan yang Antisipatif, Osborne dan Gaebler menggagas perencanaan strategis yaitu cara untuk mengantisipasi masa depan, atau cara lain untuk membuat keputusan berdasarkan pandangan kedepan. BUM Desa Tirta Mandiri mempunyai perencanaan strategis. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya BUM Desa dalam mempersiapkan organisasinya yang antisipatif melalui pematangan sumber daya manusia, yang di implementasikan dalam pelatihan-pelatihan terhadap karyawan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing area kerja.

#### 9. BUM Desa Berbasis Desentralisasi

BUM Desa Tirta Mandiri selain mendesentralisasikan wewenang juga memberikan pemahaman misi, dan melakukan pengukuran hasil kepada karyawan. Salah satunya adalah menggunakan sistem dari hierarki menuju sistem partisipasi dan tim kerja. BUM Desa Tirta Mandiri menerapkan sistem pola koordinasi berdasarkan struktur organisasi yang dirancang.

#### 10. BUM Desa Berorientasi Pasar

Pemerintah Desa Ponggok melalui BUM Desa Tirta Mandiri secara tidak langsung telah menciptakan pasar, juga upaya mengoptimalkannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penawaran yang di tawarkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri yaitu desa pariwisata. Pemerintah desa melihat adanya kebutuhan berwisata yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya bonus demografi desa klaten yaitu melimpahnya sumber mata air, maka dimanfaatkan pemerintah desa untuk memenuhi permintaan pariwisata air.

11. Sumber Daya Manusia adalah sebagai kunci dalam Faktor pendorong dan juga penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri.

#### **B. SARAN**

1. Di harapkan untuk penelitian selanjutnya adalah membandingkan antara dua (2) instansi BUM Desa atau lebih terkait tata kelola. Hal ini agar dapat dibandingkan secara utuh perihal sistem tata kelola yang baik.
2. Penelitian selanjutnya akan lebih baik bila fokus pada satu (1) atau dua (2) dari sepuluh (10) gagasan yang ada di gagas oleh Osborne dan Gaebler. Hal ini dimaksudkan untuk mengecilkan lingkup penelitian, agar dapat lebih mendalam terkait analisis penelitian.